



**KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN KETERTIBAN PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI
PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO. 3 TAHUN. 2023)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar

Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri



Disusun Oleh:

FRENDINATA

NIM: 301201010028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Frendinata
Nim : 301201010028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Pengaturan Ketertiban Dagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun. 2023)

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 2026
Yang menyatakan



Frendinata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**
Alamat : Jl. HR. Soebrantas No. 17 Tembilahan – Indragiri Hilir

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Frendinata
Nim : 301201010028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Pengaturan Ketertiban Dagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun. 2023)

Tembilahan, 2026

PEMBIMBING I

JAMRI, S.H., M.H

PEMBIMBING II

HERDIANSYAH, Lc., M.A

KETUA PROGRAM STUDI



Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau
Indonesia

☎ 0853 633011314

(0763) 21386

Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor 68/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, Rabu, 22 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama : FRENDINATA
NIM : 301201010028
Judul Skripsi : KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN KETERTIBAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO. 03 TAHUN 2023)
Waktu : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil : B
Keterangan : Aman dan Tertib

Tembilahan, Agustus, 2026

Tim Penguji

1. JAMRI, S.H., M.H
2. HERDIANSYAH, Lc., M.A
3. SYARIFUDDIN, S.H., M.H
4. Dr. ALI AZHAR, S.Sos., M.H
5. Dr. FENI PUSPITASARI, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Dr. ALI AZHAR, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
Nipy. 2391 03 251



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frendinata
 Nim : 301201010028
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Pengaturan Ketertiban Dagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun. 2023)
 Pembimbing I : Jamri, S.H., M.H
 Pembimbing II : Herdiansyah, Lc., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1	09/05/2026		✓	Perbaiki penulisan BAB II	f.
2	15/05/2026		✓	Perbaiki penulisan BAB III	f.
3	03/06/2026		✓	Perbaiki penulisan BAB IV dan Daftar Pustaka	f.
4	08/06/2026		✓	Acc lanjut Pembimbing I	f.
5	2/6/2026	✓		Finalisasi dan koreksi ke format makalah	f.
6	4/6/2026	✓		Revisi ke format makalah yang sudah selesai	f.
7	21/6/2026	✓		Revisi ke format makalah yang sudah selesai	f.
8	2/6/2026	✓		Selesai	f.

Tembilahan, 2026

Mengetahui
Dekan

Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H



KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN KETERTIBAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO. 3 TAHUN. 2023)

Oleh: Frendinata

Pembimbing I: Jamri, S.H., M.H, Pembimbing II: Herdiansyah, Lc., M.A

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena *vacuum of norm* (kekosongan hukum) dalam pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Ketidakpastian norma timbul akibat ketiadaan ketentuan eksplisit (*lex lata*) yang mengornamentasi mekanisme operasional pengawasan, kriteria pelanggaran komoditas, dan skema sanksi administratif secara berjenjang di tingkat daerah.

Melalui pendekatan yuridis-normatif berbasis analisis deskriptif-kualitatif, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa kekosongan norma terjadi karena orientasi regulasi yang mendominasi hanya terbatas pada penataan ruang ketertiban umum (*spatial order*), tanpa mengintegrasikan rezim hukum kepabeanaan dan perdagangan barang terlarang. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan delegasi kewenangan (*delegated authority*) daerah dalam urusan perdagangan luar negeri, inkonsistensi perancangan naskah akademik, serta pertimbangan keberlanjutan ekonomi sosiologis masyarakat lokal.

Dampak dari kekosongan norma tersebut bermuara pada marginalisasi kepastian hukum dan ketiadaan dasar hukum (*legitimacy of action*) bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengintervensi peredaran pakaian bekas. Sebagai rekonstruksi hukum, penelitian ini merekomendasikan formulasi norma eksplisit atau klausul integratif (*integrative clause*) dalam revisi Perda yang mengatur mekanisme kordinasi lintas sektoral, pembagian kewenangan pengawasan, dan sinkronisasi sanksi administratif yang terukur.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

LEGAL VACUUM IN REGULATING THE ORDER OF USED CLOTHING TRADE FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY (A STUDY OF INDRAGIRI HILIR REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2023)

Oleh: Frendinata

Pembimbing I: Jamri, S.H., M.H, Pembimbing II: Herdiansyah, Lc., M.A

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of normative vacuum in the regulation and enforcement of imported used clothing trade pursuant to Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2023, along with its implications for the principle of legal certainty. The ambiguity stems from the absence of explicit operational provisions (lex lata) governing supervisory mechanisms, commodity infringement standards, and graduated administrative sanction schemes at the local level.

Utilizing a normative-juridical method with a descriptive-qualitative approach, the research demonstrates that the legal vacuum persists because the regulation exclusively emphasizes public order spatial management while disregarding customs and prohibited trade regimes. This gap is exacerbated by limitations on regional delegated authority over foreign trade, flaws in academic drafting preparation, and local socio-economic considerations.

Consequently, this normative absence results in legal uncertainty and deprives enforcement officers (Satpol PP) of the statutory mandate required for operational intervention. As a legal reconstruction, this study recommends formulating explicit provisions or an integrative clause in the regulatory amendment, delineating cross-sectoral coordination mechanisms, supervisory jurisdictions, and synchronized administrative sanctions.